

Pemberdayaan UMKM Desa Bontoloe Melalui Pendataan, Validasi Data, dan Digitalisasi Usaha Berbasis Google Maps

Ibnu Hajar^{1*}, Rafli², Suci Ramadani³, Ayesha Azzahra Parsa⁴, Siti Rosmiati⁵, Elsa Faigah⁶, Selvi Widiyanti⁷, Sri Naisyila Aulia Nurdin⁸, Ulan Sari⁹, Muhammad Dialul Haq¹⁰, Muhammad Ridwan¹¹

¹Program Studi Fisika, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, Indonesia

²Program Studi Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, Indonesia

³⁻⁴Program Studi Pendidikan Dokter, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, Indonesia

⁵Program Studi Sastra Inggris, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, Indonesia

⁶Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, Indonesia

⁷Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, Indonesia

⁸Program Studi Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, Indonesia

⁹Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, Indonesia

¹⁰Program Studi Sastra Inggris, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, Indonesia

¹¹Program Studi Matematika, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, Indonesia

*Email Korespondensi: ibnuhajar0908@gmail.com

ABSTRAK

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomian masyarakat pedesaan, tetapi pendataan yang belum mutakhir dan keterbatasan pemanfaatan teknologi digital dapat menghambat pengembangan usaha. Program NAFAS UMKM (Navigasi, Administrasi, Fasilitasi, dan Akselerasi UMKM) dilaksanakan untuk melakukan pendataan ulang, validasi kondisi usaha, serta pendampingan digitalisasi UMKM di Desa Bontoloe, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar. Kegiatan dilaksanakan pada 9–18 September 2026 melalui empat tahap, yaitu identifikasi kebutuhan, perencanaan pembagian tim, pendataan dan verifikasi lapangan, serta monitoring dan evaluasi. Pendataan menyasar UMKM pada enam dusun dengan menggunakan data awal yang memuat NIB, nama pemilik, nama usaha, alamat, KBLI, skala usaha, sektor, dan status usaha. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa 536 UMKM tercatat pada data awal, sedangkan 164 UMKM berhasil didatangi dan didata di lapangan. Dari jumlah tersebut, 105 UMKM berstatus aktif, 54 tidak aktif, 4 tutup, dan 1 masih berstatus belum diverifikasi. Dari 164 UMKM yang didatangi, 16 belum memiliki Google Maps; 14 UMKM bersedia dibantu melakukan pendaftaran dan 2 menolak. Kegiatan menghasilkan data yang lebih terstruktur, membantu meningkatkan keterlihatan lokasi usaha melalui Google Maps bagi UMKM yang bersedia, serta mengidentifikasi kebutuhan pendampingan administrasi dan literasi digital. Keberlanjutan program diarahkan pada pemanfaatan data oleh pemerintah desa dan pendampingan lanjutan oleh pihak terkait.

Kata Kunci: pemberdayaan umkm; pendataan dan validasi data; digitalisasi usaha; google maps; desa bontoloe

1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan bagian penting dari aktivitas ekonomi masyarakat dan memiliki posisi strategis dalam pembangunan ekonomi. UMKM berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja, pendapatan masyarakat, dan dinamika ekonomi lokal. Hidayat dkk. (2022) menunjukkan bahwa UMKM memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi nasional, sementara digitalisasi membuka peluang untuk memperluas akses dan jangkauan pemasaran. Juwita dan Handayani (2022) menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi digital dapat memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan visibilitas usaha, meskipun adopsinya masih menghadapi kendala sumber daya manusia, infrastruktur, jejaring, serta faktor sosial dan perilaku.

Desa Bontoloe merupakan salah satu desa di Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, yang terdiri atas enam dusun, yaitu Dusun Bontoloe, Kalumpang, Bobojangang, Timbuseng, Tala-Tala, dan Sapanjang. Berdasarkan data awal yang diterima tim dari Kementerian UMKM, terdapat 536 UMKM yang tercatat di desa tersebut. Data awal memuat informasi tentang NIB, nama pemilik, nama usaha, alamat, KBLI, skala usaha, sektor, dan status usaha. Jenis usaha yang terdata beragam, antara lain kuliner, perdagangan eceran, jasa, dan industri pengolahan.

Hasil observasi awal menunjukkan bahwa data administrasi belum sepenuhnya menggambarkan kondisi lapangan. Sejumlah usaha berada di dalam gang atau lorong, tidak memiliki papan nama, belum terdaftar di Google Maps, atau sudah tidak aktif. Kondisi lokasi yang sulit ditemukan juga berpengaruh terhadap kemudahan pelanggan dalam menjangkau usaha. Selain itu, sebagian besar pelaku UMKM yang

ditemui belum memiliki pencatatan keuangan yang teratur sehingga mengalami kesulitan ketika diminta menjelaskan omzet, laba, atau kerugian secara rinci. Temuan lapangan tersebut menunjukkan bahwa persoalan UMKM di Desa Bontoloe tidak hanya berkaitan dengan keberadaan usaha, tetapi juga dengan ketepatan data dan keterlihatan usaha di ruang digital.

Program NAFAS UMKM (Navigasi, Administrasi, Fasilitasi, dan Akselerasi UMKM) dirancang sebagai pendekatan terpadu yang menghubungkan pendataan lapangan, validasi kondisi usaha, dan pendampingan digitalisasi melalui Google Maps. Pendekatan tersebut relevan dengan kegiatan pengabdian sebelumnya yang menunjukkan bahwa Google Maps dapat digunakan sebagai media promosi dan membantu masyarakat menemukan lokasi UMKM secara lebih mudah (Insani dkk., 2022). Studi yang lebih baru juga menunjukkan bahwa optimalisasi titik lokasi pada Google Maps dapat menjadi strategi pemasaran digital yang sederhana bagi UMKM, terutama ketika keterbatasan literasi digital masih menjadi hambatan (Safitri & Nugroho, 2025; Apriliana dkk., 2026). Pada konteks pemberdayaan desa, pemetaan potensi dan kendala UMKM serta keterlibatan aktif masyarakat juga dipandang penting untuk mendukung keberlanjutan program (Wulandari dkk., 2024).

Kebaruan kegiatan ini terletak pada penggabungan tiga kebutuhan yang ditemukan secara langsung di Desa Bontoloe, yaitu pembaruan data UMKM, validasi kondisi usaha, dan pendampingan pencantuman lokasi usaha pada Google Maps dalam satu rangkaian kegiatan lapangan. Integrasi tersebut tidak dimaksudkan untuk menggantikan pendampingan usaha yang lebih komprehensif, melainkan menjadi langkah awal untuk menyediakan data yang lebih dapat digunakan dan meningkatkan keterlihatan UMKM yang bersedia memanfaatkan media digital. Pendekatan serupa pada pengabdian UMKM menunjukkan bahwa integrasi identitas dan lokasi digital dapat memperkuat aksesibilitas usaha, meskipun keberlanjutannya tetap memerlukan pendampingan (Abidin dkk., 2026).

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian ini bertujuan menghasilkan data UMKM Desa Bontoloe yang lebih terstruktur dan terverifikasi, memvalidasi kondisi usaha di lapangan, membantu UMKM yang belum memiliki Google Maps agar lebih mudah ditemukan, serta membangun koordinasi antara pelaku UMKM, pemerintah desa, dan pihak terkait. Manfaat yang diharapkan adalah tersedianya basis informasi yang lebih berguna bagi pemerintah desa, meningkatnya keterlihatan lokasi usaha bagi UMKM yang mengikuti pendampingan digitalisasi, serta tersedianya informasi awal mengenai kebutuhan pendampingan administrasi dan literasi digital UMKM.

2. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian dilaksanakan di Desa Bontoloe, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, pada 9–18 September 2026. Sasaran kegiatan adalah pelaku UMKM pada enam dusun di Desa Bontoloe, baik usaha yang tercatat aktif, tidak aktif, maupun yang perlu dikonfirmasi kembali di lapangan. Pelaksanaan menggunakan pendekatan pendataan dan pendampingan lapangan yang disusun dalam empat tahap.

2.1. Identifikasi Kebutuhan dan Perencanaan

Tahap identifikasi kebutuhan dilakukan dengan menerima data awal UMKM dari Kementerian UMKM dan berkoordinasi dengan pemerintah desa. Data awal menjadi dasar penentuan sasaran kunjungan dan memuat NIB, nama pemilik, nama usaha, alamat, KBLI, skala usaha, sektor, serta status usaha. Selanjutnya, sepuluh mahasiswa KKN Posko 3 Desa Bontoloe dibagi menjadi tiga kelompok untuk menjangkau enam dusun. Kelompok pertama bertanggung jawab di Dusun Sapanjang dan Timbuseng; kelompok kedua di Dusun Bontoloe dan Kalumpang; sedangkan kelompok ketiga di Dusun Bobojangang dan Tala-Tala. Pembagian tersebut dilakukan agar cakupan pendataan lebih terorganisasi dan waktu pelaksanaan dapat dimanfaatkan secara efektif.

2.2. Pendataan, Validasi, dan Pendampingan Digital

Tahap pelaksanaan dilakukan dengan mendatangi rumah atau toko UMKM berdasarkan data yang tersedia. Tim melakukan pengecekan kondisi usaha dan mencatat informasi yang diperoleh melalui wawancara dengan pemilik atau pihak yang ditemui. Informasi yang digali meliputi identitas usaha, kondisi aktif atau tidak aktif, omzet, kerugian, jumlah pekerja, dan kondisi usaha secara umum. Untuk UMKM yang belum memiliki Google Maps, tim menawarkan pendampingan pendaftaran dan membantu prosesnya bagi pemilik yang bersedia. Kegiatan juga didokumentasikan sebagai bahan laporan. Tidak semua UMKM bersedia didaftarkan karena beberapa pemilik menganggap usahanya terlalu kecil, memiliki keterbatasan kemampuan teknologi,

menjalankan usaha dengan lokasi yang tidak menetap, mengalami kerusakan perangkat telepon seluler, atau menilai promosi digital belum diperlukan.

2.3. Indikator Keberhasilan dan Evaluasi

Indikator keberhasilan kegiatan ditinjau dari tersusunnya hasil pendataan yang lebih terstruktur, teridentifikasinya status usaha yang berhasil didatangi, tersedianya pendampingan Google Maps bagi UMKM yang belum terdaftar dan bersedia mengikuti proses, serta tersusunnya rekomendasi untuk pemerintah desa. Evaluasi dilakukan melalui pengecekan ulang data yang telah diinput, pencocokan informasi hasil kunjungan dengan data awal, dokumentasi kegiatan, dan penyusunan rekomendasi. Karena waktu pelaksanaan KKN hanya sepuluh hari, seluruh UMKM pada data awal belum dapat diverifikasi secara langsung. Keterbatasan informasi lokasi dan ketidakhadiran pemilik pada saat kunjungan juga menjadi faktor yang memengaruhi cakupan verifikasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendataan lapangan memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai kondisi UMKM dibandingkan hanya mengandalkan data awal. Dari 536 UMKM yang tercatat, sebanyak 164 UMKM berhasil didatangi dan didata di lapangan selama sepuluh hari pelaksanaan. Dari 164 data hasil kunjungan tersebut, 105 UMKM tercatat aktif, 54 tidak aktif, 4 tutup, dan 1 masih berstatus belum diverifikasi. Sebanyak 372 UMKM belum dapat didatangi atau diverifikasi secara langsung karena keterbatasan waktu, keterbatasan informasi lokasi, atau pemilik usaha tidak berada di tempat. Rekapitulasi tersebut menunjukkan pentingnya pemutakhiran data secara berkala karena status pada data administratif tidak selalu sama dengan kondisi lapangan.

Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Pendataan UMKM Desa Bontoloe

Komponen	Jumlah
UMKM terdata awal (Kementerian)	536
UMKM yang didatangi dan didata	164
UMKM aktif	105
UMKM tidak aktif	54
UMKM tutup	4
UMKM dengan status belum diverifikasi	1
UMKM belum didatangi/diverifikasi	372
UMKM belum memiliki Google Maps	16
UMKM dibantu pendaftaran Google Maps	14
UMKM menolak pendaftaran Google Maps	2

Sumber: Data olahan tim KKN Posko 3 Desa Bontoloe, 2026.

3.1. Pendataan dan Validasi Kondisi UMKM

Temuan lapangan memperlihatkan bahwa data administratif perlu diperlakukan sebagai titik awal, bukan sebagai gambaran final kondisi UMKM. Tim menemukan usaha yang sulit ditemukan karena berada di dalam gang atau lorong, usaha tanpa papan nama, serta usaha yang sudah tidak aktif atau tutup. Temuan tersebut memperkuat kebutuhan akan pemutakhiran data berbasis kunjungan lapangan agar pemerintah desa memiliki informasi yang lebih sesuai dengan kondisi aktual.

Cakupan 164 UMKM yang berhasil didatangi juga memperlihatkan keterbatasan kegiatan dalam menjangkau seluruh data awal. Sebanyak 372 UMKM belum dapat didatangi atau diverifikasi secara langsung. Keterbatasan tersebut terutama dipengaruhi durasi KKN yang hanya sepuluh hari, informasi lokasi yang tidak selalu lengkap, dan pemilik yang tidak berada di tempat. Dengan demikian, hasil kegiatan tidak dimaksudkan sebagai validasi menyeluruh atas 536 UMKM, tetapi sebagai pemutakhiran awal terhadap UMKM yang berhasil dijangkau selama periode kegiatan.

Dari sisi pemberdayaan, hasil pendataan menyediakan dasar yang lebih jelas untuk menentukan tindak lanjut. UMKM aktif dapat menjadi sasaran penguatan kapasitas dan digitalisasi, sedangkan UMKM yang tidak aktif atau tutup memerlukan konfirmasi dan pembaruan status pada basis data. Pendekatan identifikasi potensi dan kendala seperti ini sejalan dengan strategi pengabdian yang menempatkan pemetaan kondisi UMKM sebagai dasar pemilihan intervensi yang relevan (Wulandari dkk., 2024).

3.2. Digitalisasi Lokasi Usaha melalui Google Maps

Pada aspek digitalisasi, dari 164 UMKM yang didatangi dan didata, terdapat 16 UMKM yang belum memiliki Google Maps. Sebanyak 14 UMKM bersedia dibantu melakukan pendaftaran, sedangkan 2 UMKM

menolak. Penolakan berkaitan dengan persepsi bahwa usaha terlalu kecil untuk dikenal luas, keterbatasan kemampuan teknologi, lokasi usaha yang tidak menetap karena berjualan keliling atau di lapangan, perangkat telepon seluler yang rusak, serta anggapan bahwa usaha belum membutuhkan promosi digital.

Bagi UMKM yang mengikuti pendampingan, pendaftaran lokasi pada Google Maps merupakan bentuk digitalisasi yang relatif sederhana dan langsung berkaitan dengan persoalan aksesibilitas. Pengalaman seorang penjahit di Dusun Bontoloe menjadi contoh kontekstual: lokasi rumah usaha yang berada di gang padat membuat pelanggan kesulitan menemukan tempat usaha, sehingga pencantuman lokasi pada Google Maps dipandang membantu. Temuan tersebut konsisten dengan kegiatan pengabdian sebelumnya yang menunjukkan bahwa Google Maps dapat digunakan sebagai alternatif media promosi dan membantu pelanggan menjangkau lokasi UMKM (Insani dkk., 2022).

Kajian yang lebih baru juga menunjukkan bahwa optimalisasi titik lokasi di Google Maps dapat digunakan sebagai strategi pemasaran digital sederhana, terutama ketika pelaku usaha menghadapi keterbatasan literasi digital (Safitri & Nugroho, 2025; Apriliana dkk., 2026). Namun, hasil kegiatan Bontoloe juga menunjukkan bahwa keberadaan teknologi tidak otomatis menghasilkan adopsi. Ketersediaan pemilik, kemampuan menggunakan perangkat, karakter lokasi usaha, dan persepsi terhadap manfaat promosi menjadi faktor yang memengaruhi keputusan untuk mendaftarkan usaha. Oleh karena itu, pendampingan perlu menempatkan kebutuhan dan kesiapan pelaku usaha sebagai bagian dari proses digitalisasi.



Gambar 1. Kompilasi dokumentasi pendataan UMKM di Desa Bontoloe.

3.3. Administrasi dan Keuangan

Selain validasi data dan digitalisasi lokasi, pendataan menunjukkan persoalan administrasi dan keuangan yang masih perlu ditindaklanjuti. Sebagian besar pemilik UMKM yang ditemui belum memiliki pencatatan keuangan yang teratur. Untuk mengetahui keuntungan, mereka cenderung menghitung secara

sederhana berdasarkan pemasukan dan pengeluaran. Sebagian pemilik juga kesulitan menjawab pertanyaan mengenai omzet atau laba karena tidak melakukan pencatatan secara khusus.

Temuan tersebut tidak menjadi objek pelatihan akuntansi khusus dalam kegiatan ini, sehingga hasilnya tidak dapat digunakan untuk menyatakan adanya peningkatan literasi keuangan secara kuantitatif. Namun, informasi yang diperoleh menunjukkan bahwa pendataan UMKM dapat sekaligus mengidentifikasi kebutuhan pendampingan lanjutan. Dengan adanya data yang lebih terstruktur, pemerintah desa dan mitra pendamping dapat menyusun intervensi berikutnya secara lebih terarah, misalnya pengenalan pencatatan pemasukan dan pengeluaran sederhana sesuai kebutuhan pelaku usaha.

3.4. Dampak, Kendala, dan Faktor Pendukung

Program NAFAS UMKM menghasilkan beberapa luaran langsung, yaitu tersusunnya hasil pendataan lapangan terhadap UMKM yang berhasil dijangkau, teridentifikasinya status usaha, dan tersedianya pendampingan pendaftaran Google Maps bagi 14 UMKM yang bersedia. Kegiatan juga membangun komunikasi antara mahasiswa, pelaku UMKM, masyarakat sekitar, dan pemerintah desa. Pada tingkat yang lebih praktis, UMKM yang telah memiliki titik lokasi digital menjadi lebih mudah diarahkan kepada pelanggan yang membutuhkan informasi lokasi usaha.

Dampak tersebut perlu dibaca secara proporsional. Kegiatan ini belum melakukan pengukuran kuantitatif terhadap perubahan omzet, jumlah pelanggan, atau peningkatan penjualan setelah pendaftaran Google Maps. Karena itu, manfaat yang dapat disimpulkan dari kegiatan adalah peningkatan keterlihatan dan kemudahan akses lokasi bagi UMKM yang mengikuti pendampingan, bukan peningkatan kinerja usaha yang telah terbukti secara statistik. Sikap kehati-hatian ini penting agar luaran digitalisasi tidak disamakan secara langsung dengan peningkatan penjualan tanpa data pembandingan.

Kendala utama kegiatan meliputi lokasi UMKM yang sulit ditemukan, usaha yang sudah tidak aktif, pemilik yang tidak berada di tempat, cuaca panas pada siang hingga sore hari, kesulitan pemilik menjelaskan omzet dan laba, serta keterbatasan waktu. Tim mengatasinya dengan bertanya kepada warga sekitar, melakukan konfirmasi ulang, menjadwalkan kunjungan ulang ketika memungkinkan, membagi tugas antaranggota, dan membantu pemilik memperkirakan informasi usaha secara sederhana. Faktor pendukung antara lain minat warga untuk dibuatkan Google Maps, bantuan warga dalam menunjukkan lokasi UMKM lain, kerja sama tim, dan dukungan pemerintah desa.

Secara konseptual, hasil tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi UMKM tidak cukup dilakukan dengan menyediakan platform, tetapi perlu disertai pendampingan yang sesuai dengan kapasitas pengguna. Temuan ini sejalan dengan Juwita dan Handayani (2022) yang menempatkan keterbatasan sumber daya manusia dan faktor sosial sebagai salah satu tantangan digitalisasi UMKM. Pengalaman pengabdian lain juga memperlihatkan bahwa integrasi lokasi digital dapat menjadi bagian dari penguatan aksesibilitas dan identitas usaha, tetapi tetap memerlukan pendampingan dan keberlanjutan (Abidin dkk., 2026).

3.5. Keberlanjutan Program

Data yang telah disusun dapat dimanfaatkan pemerintah desa sebagai bahan pembaruan basis informasi UMKM dan sebagai dasar penentuan sasaran program berikutnya. Keberlanjutan juga dapat dilakukan melalui verifikasi lanjutan terhadap 372 UMKM yang belum berhasil didatangi atau diverifikasi secara langsung, terutama jika pemerintah desa memiliki waktu dan akses informasi lokasi yang lebih memadai.

Untuk aspek digitalisasi, UMKM yang telah terdaftar di Google Maps dapat melanjutkan pemanfaatan lokasi digital secara mandiri, sedangkan UMKM yang belum bersedia dapat diberikan kesempatan untuk mengikuti pendampingan ketika kesiapan perangkat, waktu, dan kebutuhan promosi sudah tersedia. Pendekatan bertahap tersebut lebih realistis dibandingkan memaksakan digitalisasi pada seluruh UMKM dalam satu periode kegiatan. Penguatan potensi UMKM melalui pelibatan masyarakat dan pendampingan berkelanjutan juga relevan dengan pendekatan pengabdian berbasis kebutuhan desa (Wulandari dkk., 2024).

3.6. Implikasi dan Batasan Kegiatan

Hasil kegiatan memiliki implikasi praktis bagi pengelolaan UMKM di tingkat desa. Pertama, data hasil kunjungan dapat digunakan sebagai dasar untuk membedakan kebutuhan tindak lanjut berdasarkan status usaha. UMKM yang masih aktif memerlukan dukungan pengembangan, sedangkan data mengenai UMKM yang tidak aktif atau tutup perlu dikonfirmasi dan diperbarui agar tidak terus menjadi rujukan yang kurang sesuai. Kedua, informasi mengenai UMKM yang belum memiliki Google Maps dapat menjadi daftar awal bagi kegiatan pendampingan digital berikutnya. Dengan demikian, pendataan tidak berhenti sebagai kegiatan administratif, tetapi dapat menjadi dasar penentuan prioritas intervensi.

Ketiga, temuan mengenai pencatatan keuangan menunjukkan bahwa kebutuhan pelaku UMKM bersifat beragam. Kegiatan ini belum dirancang sebagai pelatihan pembukuan sehingga tidak tepat menarik kesimpulan mengenai peningkatan kemampuan keuangan. Namun, informasi yang dikumpulkan dapat membantu pemerintah desa atau mitra pendamping menentukan materi pendampingan berikutnya secara lebih kontekstual. Pendekatan bertahap semacam ini penting karena kesiapan teknologi dan kebutuhan setiap pelaku usaha tidak sama. Penelitian dan kegiatan pengabdian terdahulu juga menekankan bahwa digitalisasi UMKM perlu disertai penguatan kapasitas agar teknologi benar-benar dapat dimanfaatkan dalam kegiatan usaha (Juwita & Handayani, 2022).

Keterbatasan utama kegiatan adalah cakupan verifikasi yang belum mencakup seluruh 536 UMKM. Durasi pelaksanaan hanya sepuluh hari, sementara sebagian lokasi sulit ditemukan dan sebagian pemilik tidak berada di tempat. Selain itu, kegiatan belum menggunakan pengukuran sebelum dan sesudah untuk menilai perubahan omzet, jumlah pelanggan, atau indikator kinerja usaha setelah pemanfaatan Google Maps. Oleh sebab itu, hasil kegiatan lebih tepat diposisikan sebagai pemutakhiran awal data dan fasilitasi digitalisasi, bukan sebagai bukti kausal bahwa Google Maps meningkatkan penjualan. Batasan ini sekaligus memberikan arah bagi kegiatan lanjutan, yaitu memperluas verifikasi, melakukan pendampingan secara periodik, dan apabila sumber daya memungkinkan, mengukur perubahan indikator usaha setelah digitalisasi dilakukan.

Implikasi lainnya adalah pentingnya koordinasi antara pelaku UMKM, pemerintah desa, dan pihak pendamping. Pemerintah desa dapat menggunakan hasil pendataan sebagai basis informasi yang perlu diperbarui secara berkala, sedangkan pelaku UMKM dapat menentukan bentuk digitalisasi yang sesuai dengan karakter usahanya. Pendampingan lanjutan juga dapat diarahkan pada UMKM yang belum bersedia menggunakan Google Maps, bukan dengan memaksakan pendaftaran, tetapi dengan memberikan penjelasan manfaat dan bantuan teknis ketika kondisi mereka memungkinkan. Pendekatan yang berorientasi pada kesiapan pengguna tersebut sejalan dengan temuan bahwa keterbatasan literasi digital dan faktor sosial dapat menjadi hambatan dalam adopsi teknologi oleh UMKM (Safitri & Nugroho, 2025; Abidin dkk., 2026).

Rangkaian kegiatan juga memperlihatkan bahwa pendataan, validasi, dan digitalisasi saling berkaitan. Ketika lokasi dan status usaha diperiksa secara langsung, tim memperoleh informasi yang tidak selalu terlihat pada data awal. Informasi tersebut kemudian menjadi dasar untuk menentukan apakah sebuah usaha memerlukan pembaruan data, konfirmasi lebih lanjut, atau pendampingan digital. Dengan demikian, digitalisasi lokasi tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi salah satu keluaran yang mengikuti proses identifikasi kondisi usaha. Pola tersebut memperkuat alasan penggunaan pendekatan terpadu dalam program NAFAS UMKM.

Pendekatan lapangan yang dilakukan oleh mahasiswa juga memperlihatkan nilai kolaboratif dari kegiatan pengabdian. Informasi mengenai lokasi UMKM tidak selalu dapat diperoleh hanya dari data administrasi sehingga warga sekitar menjadi sumber informasi pendukung ketika tim mengalami kesulitan menemukan alamat usaha. Dukungan pemerintah desa membantu kegiatan dalam koordinasi, sedangkan pemilik usaha menjadi sumber utama untuk mengonfirmasi kondisi dan kebutuhan usaha. Pola interaksi ini menunjukkan bahwa pemutakhiran data UMKM membutuhkan keterlibatan lebih dari satu pihak dan tidak hanya bergantung pada kemampuan teknis pendataan.

Dari sisi pelaksanaan, pembagian sepuluh mahasiswa ke dalam tiga kelompok memberikan mekanisme kerja yang memungkinkan pendataan dilakukan pada enam dusun dalam waktu yang terbatas. Namun, pembagian tugas tersebut belum menghilangkan kendala cakupan karena informasi lokasi yang tidak lengkap dan keberadaan pemilik usaha yang berubah-ubah. Hal ini menjadi pelajaran penting untuk kegiatan berikutnya: sebelum kunjungan lapangan dilakukan, data alamat dan informasi kontak perlu dipersiapkan seakurat mungkin apabila tersedia. Kegiatan lanjutan juga dapat menggunakan hasil pendataan pertama sebagai daftar kerja sehingga kunjungan berikutnya lebih terarah dan tidak mengulang pencarian lokasi dari awal.

Pengalaman pendampingan Google Maps menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi sederhana sangat dipengaruhi oleh persepsi manfaat dari pemilik usaha. Sebagian pelaku usaha menerima bantuan karena merasakan persoalan nyata berupa pelanggan yang kesulitan menemukan lokasi, sedangkan sebagian lainnya menolak karena menilai kebutuhan tersebut belum mendesak. Karena itu, pendampingan sebaiknya tidak hanya berfokus pada langkah teknis pendaftaran, tetapi juga menjelaskan hubungan antara lokasi digital, kemudahan akses pelanggan, dan keterlihatan usaha. Pendekatan berbasis kebutuhan seperti ini sejalan dengan temuan kegiatan pengabdian lain yang menempatkan pendampingan sebagai bagian penting dalam pemanfaatan Google Maps oleh UMKM (Insani dkk., 2022; Apriliansa dkk., 2026).

Secara keseluruhan, hasil kegiatan memberikan dasar untuk model pendampingan bertahap: pemutakhiran data terlebih dahulu, konfirmasi kondisi usaha berikutnya, kemudian fasilitasi digitalisasi sesuai kesiapan pelaku usaha. Model ini dapat mengurangi risiko pemberian intervensi yang tidak sesuai kebutuhan dan memungkinkan pemerintah desa memprioritaskan UMKM berdasarkan informasi yang tersedia. Pada tahap berikutnya, pendampingan dapat diarahkan pada pemeliharaan informasi Google Maps, administrasi

usaha, dan pencatatan keuangan sederhana apabila tersedia sumber daya serta mitra yang sesuai. Dengan demikian, kegiatan NAFAS UMKM dapat dipandang sebagai tahap awal yang membangun fondasi informasi dan hubungan kerja untuk pengembangan UMKM Desa Bontoloe secara berkelanjutan.

4. KESIMPULAN

Program NAFAS UMKM telah melaksanakan pendataan, validasi awal kondisi usaha, dan pendampingan digitalisasi UMKM di Desa Bontoloe pada 9–18 September 2026. Dari 536 UMKM yang tercatat pada data awal, 164 UMKM berhasil didatangi dan didata di lapangan. Hasil pendataan menunjukkan 105 UMKM aktif, 54 tidak aktif, 4 tutup, dan 1 masih berstatus belum diverifikasi, sedangkan 372 UMKM belum dapat didatangi atau diverifikasi secara langsung.

Pada aspek digitalisasi, 16 UMKM yang didatangi belum memiliki Google Maps. Sebanyak 14 UMKM bersedia dibantu melakukan pendaftaran dan 2 UMKM menolak karena faktor persepsi kebutuhan, keterbatasan kemampuan teknologi, lokasi usaha yang tidak menetap, dan kondisi perangkat. Kegiatan menghasilkan basis informasi lapangan yang lebih terstruktur serta membantu keterlihatan lokasi usaha bagi UMKM yang mengikuti pendampingan. Namun, kegiatan ini belum mengukur perubahan omzet, jumlah pelanggan, atau penjualan sehingga manfaat yang dilaporkan terbatas pada luaran dan perubahan yang benar-benar teramati selama pelaksanaan.

Keberlanjutan program perlu diarahkan pada verifikasi lanjutan terhadap data yang belum terjangkau, pemanfaatan basis data oleh pemerintah desa, serta pendampingan digital dan administrasi secara bertahap sesuai kesiapan pelaku UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, M. Z., Khoiriyah, S., Zakariya, M., & Suningsih, S. (2026). Digitalisasi identitas UMKM Desa Sukorejo: Pembuatan logo dan integrasi Google Maps sebagai strategi branding lokal. *Abdi: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 8(1), 282–290. <https://doi.org/10.24036/abdi.v8i1.1772>
- Apriliana, E. M., Sari, C., Romadhoni, P. S., Aliefudin, N., & Zaki, A. (2026). Manajemen pemasaran digital: Pendampingan UMKM Toko Berkah Satu melalui optimalisasi titik lokasi di Google Maps Desa Wadungasih. *Jurnal Pengabdian Inovatif Masyarakat*, 3(1), 30–36. <https://doi.org/10.62759/jpim.v3i1.326>
- Hidayat, A., Lesmana, S., & Latifah, Z. (2022). Peran UMKM (usaha, mikro, kecil, menengah) dalam pembangunan ekonomi nasional. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3(6), 6707–6714.
- Insani, S. F., Syahrial, Y., & Putra, A. P. (2022). Optimalisasi aplikasi Google Maps sebagai alternatif media promosi pada UMKM di Shelter Taman Sriwedari. *Warta LPM*, 25(1), 44–56. <https://doi.org/10.23917/warta.v25i1.596>
- Juwita, D., & Handayani, A. N. (2022). Peluang dan tantangan digitalisasi UMKM terhadap pelaku ekonomi di era *Society 5.0*. *Jurnal Inovasi Teknologi dan Edukasi Teknik*, 2(5), 249–255. <https://doi.org/10.17977/um068v2i52022p249-255>
- Safitri, S. N., & Nugroho, R. H. (2025). Strategi digitalisasi UMKM melalui Google Maps dalam meningkatkan daya saing bisnis. *Jurnal Studi Administrasi Bisnis*, 1(4), 1106–1116.
- Wulandari, W., Maryati, M., & Hutagaluh, O. (2024). Community service strategy: Optimising the potential of MSMEs in the village. *Journal of Community Dedication*, 4(4), 918–926.